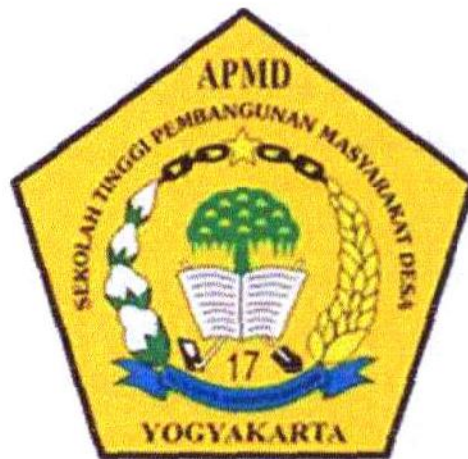


SKRIPSI

**GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN
UMKM PENGRAJIN BATIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi terhadap UMKM Pengrajin Batik di Kalurahan Pandowoharjo,
Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

**TRIFONIA IRENE DARMIN
18520082**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



**GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN
UMKM PENGRAJIN BATIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

(Studi terhadap UMKM Pengrajin Batik Di Kalurahan Pandowoharjo,
Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**JENJANG PENDIDIKAN S-1 ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan, memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Januari 2022

Jam : 9.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Drs. Sumarjono, M.Si

Dosen Pembimbing



2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

Dosen Penguji Samping I



3. Utami Sulistiana, S.P., M.P


Dosen Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trifonia Irene Darmin

Nim : 18520082

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN UMKM PENGRAJIN BATIK DITENGAH PANDEMI COVID-19 adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan dengan benar.

Yogyakarta, 9 Febuari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Trifonia Irene Darmin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan puji serta syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan Perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan dan tuntunan-Nya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih saya kepada semua orang yang senantiasa mendukung penyelesaian Skripsi ini dengan caranya masing-masing :

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Rofinus Nabut dan Ibu Leonarda Lulus yang telah mendukung saya menyelesaikan skripsi ini dengan doa, cinta dan kasih sayang yang sangat tulus, terimakasih sudah mendengar cerita baik dan buruk, juga terimakasih karena masih bertahan dan menjadi satu-satunya tempat untuk pulang bagi saya sampai sekarang. Kekuatan doa kalianlah yang membawa saya sampai pada titik sekarang.
2. Terimakasih kepada mama Bety, Bapa Tarsi, Om Tobi, Tanta Rita, Mama Ro, Om Vinus, Tanta Maria, Om Vikus, Bapa Ande, Mama So, Mama Kori, Bapa Mir, tanta Lembu, Om Tinus, Nenek Martina, Om Leksi, Tanta Mensy dan Alm. Tanta Gina yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada kedua kakak saya Aris Kampur dan Edwar Gunawan yang sudah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua keluarga, suku Pongkor yang begitu luar biasa telah mendukung saya dalam proses perkuliahan sampai pada proses penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk Dosen Pembimbing Tercinta Drs. Sumarjono, M.Si terimakasih banyak sudah mau membimbing saya dengan sabar dan penuh ketulusan menjalankan amanah sebagai dosen, saya sangat bangga karena sudah mau membimbing hingga sampai pada tahap ini, semoga sehat selalu, Tuhan Yesus Menyertai.
6. Untuk sahabat-sahabat, Xaveriani Wulandari, Ren Asman, Lystim Mariana, Krisanta, Santi, Mega Milly, Fenan Jem, Lius Servas, Fitry Jabur,

Mia, Helaria Arni, Kak Heri Kabut, Abe Padji, Silvia Wela, Agnes, yasin, Matil, Sepupu saya Kak Erna Serena, Kak Dion, Gio Bagung, Ecak Jena, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terimakasih telah membantu dengan caranya masing-masing yang sudah memberikan saya semangat luar biasa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Untuk sahabat perjuangan angkatan 2018 APMD (Ambu, Tino, Kristo, Juan, Ando, Stella, Inel, Vallent, Iino Darmawan, Daresta, Prili Kristin, Bowo, Simson, Adio, Susan, yang selalu mendukung dan berjalan bersama selama perkuliahan.
8. Untuk senior terbaik, (Angela Kiki, Ensi Orliana, Natalia Mara, Atik Don, Mira Dupa, Gepang, Lisa Stefani, Abang Ferdi, Kak Fiona Bahy, Kak Hilda Reka) terimakasih sudah mau berbagi dan menjadi teman terbaik kepada saya selama perkuliahan sampai pada proses penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih untuk para senior dan teman-teman Ikatan Keluarga Besar Lembor Welak (IKALEWA) yang telah memberikan banyak dorongan bagi saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

MOTTO

“Allah Turut Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan”

(Roma 8:28)

“Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang”

(Amsal 20:13)

“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi)

(Andrea Hirata)

“Sukses itu pilihan, tetapi kalau mau sukses harus usaha”

(Vanti Darmin)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, penyertaan serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sadari melalui Kemurahan Tuhan, banyak suka cita yang diberikan melalui keluarga, sahabat, dan lingkungan dalam menemani proses yang dilalui oleh penulis. Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis dalam mengkaji masalah ini. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan, dan kesulitan yang ditemui. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik. Namun patut di syukuri karena banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan.

Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat Penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M,A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Catur Sarjumihata selaku Lurah Kalurahan Pandowoharjo beserta aparat desa dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerjasama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan penuh kepada peneliti.

Yogyakarta, 9 Januari 2022

Penulis,

Trifonia Irene Darmin

INTISARI

Penelitian ini akan mengkaji tentang Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik di Tengah Pandemi Covid-19. Adanya penelitian ini berangkat dari adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, dalam hal membatik. Kerajinan membatik ini merupakan kegiatan sampingan yang dilakukan oleh ibu PKK untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Namun yang menjadi persoalan dalam mengembangkan batik ini yang mana dari pemerintah Kalurahan Pandowoharjo sendiripun belum memiliki inovasi baru terkait UMKM Pengrajin Batik. Selain itu, belum adanya kebijakan khusus terkait UMKM Pengrajin Baatik ini sehingga keberadaan UMKM Pengrajin Baatik ini belum diakui dan diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang dipakai adalah metode eksplanasi, melalui teknik wawancara pada para informan yakni perangkat desa dan pengrajin batik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi di lapangan dan teknik keabsahan data. Untuk subyeknya penelitiannya terdiri dari pemerintah desa dan pengrajin batik yang berjumlah 3 orang.

Dari hasil penelitian tentang Governing Pemerintah Desaa dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik ditengah Pandemi Covid-19, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya Governing pemerintah desa terhadap pengembangan UMKM pengrajin batik. Selama pandemi Covid-19 para pengrajin batik mengalami kesulitan baik dari segi anggaran maupun pemasaran sehingga pendapatan semakin berkurang dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Pemerintah Desa belum ada kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami para pelaku bisnis UMKM pengrajin batik. Jadi keberadaan UMKM pengrajin batik di Kalurahan Pandowoharjo ini belum ada perhatian penuh dari Pemerinrah Desa atau belum maksimal Governing Pemerintah Desa terhadap pengembangan UMKM pengrajin batik dan belum masuk dalam RKPDesa, APBDesa, ataupun Peraturan Desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, UMKM Pengrajin Batik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup. Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia, karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran. UMKM dapat menjadi solusi atas masalah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Dengan kalimat lain, keberadaan UMKM ini menjadi salah satu penggerak ekonomi atau meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, serta menjadikan masyarakat yang produktif dan inovasi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kuatnya arus globalisasi, UMKM cukup kesulitan dalam menghadapi persaingan saat ini. Arus globalisasi menuntut perusahaan yang berada pada

tingkat mikro ekonomi untuk dapat meningkatkan efisiensi produksinya agar tetap bertahan di tengah persaingan global yang mencakup lingkup lokal, nasional, dan internasional. Selain itu, kemampuan mengembangkan bisnis ke internasional telah menjadi satu elemen penentu dalam persaingan pada era globalisasi (Lecerf, 2012).

Modernisasi dan globalisasi mendorong UMKM memiliki keunggulan kompetitif yang mampu untuk menghadapi persaingan dunia internasional. Keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan bertahan di tengah pasar persaingan dan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan (Ciochina et al., 2011). Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UMKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar.

Sekalipun para pelaku bisnis tersebut bertaraf UMKM tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak lepas dari perhatian yang mana mereka harus saling bersaing untuk mampu menarik minat pasar dan bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku bisnis UMKM mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas tentu salah satunya dikarenakan kesadaran mereka terhadap konsumen dan calon konsumen yang lebih selektif sebelum melakukan keputusan pembelian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan tentang UMKM dan kriterianya, yaitu: *Pertama*, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. *Kedua*, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. *Ketiga*, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Di awal tahun 2020 ini, serangan wabah Covid-19 yang terjadi secara global hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis termasuk bisnis UMKM. Dampak negatif wabah Covid-19 ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM. Hal ini terjadi karena pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pameran atau promosi terhalang dengan adanya *physical Distancing* dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun kebijakan PSBB ini dianggap mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin luas di Indonesia.

Tidak dapat pungkiri bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran yang strategis dalam sistem ekonomi Negara. Peran strategis UMKM di

antaranya menyerap lapangan kerja yang lebih luas dan menyerap sumber daya lokal sehingga memberi penghasilan yang berdampak positif pada upaya pengentasan kemiskinan. Singkatnya, UMKM dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kalurahan Pandowoharjo merupakan salah satu sentra industri potensial untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sleman khususnya di bidang batik. Pada tanggal 29 September 2016 desa ini dikukuhkan menjadi Sentra Batik oleh Bupati Sleman. Dengan kenyataan ini, arah perkembangan ekonomi nasional dalam era ekonomi kreatif ini menuntut adanya program untuk mengembangkan UMKM industri kreatif.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan salah satu dari banyak pihak yang sangat merasakan dampak negatif dari wabah Covid-19. Para pelaku bisnis UMKM merasa cemas dengan penghasilan yang semakin menurun di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

Upaya untuk mengembangkan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai hal terutama melalui kegiatan yang berorientasi pada pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran. Melalui proses pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran diharapkan usaha kecil dapat berkembang dengan lebih baik, mampu mandiri, serta mampu bersaing di pasar lokal maupun global. Kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran diharapkan dapat memulihkan kondisi UMKM di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini

sebagian besar masih belum stabil, terutama yang berada pada level mikro kecil.

Kondisi UMKM di Kalurahan Pandowoharjo tentu saja membutuhkan respon dari berbagai pihak terutama Pemerintah Desa. Respon Pemerintah Desa tersebut dapat berupa kebijakan, strategi, atau program yang berikhtiar untuk mempertahankan eksistensi UMKM di tengah pandemi Covid-19. Respon Pemerintah Desa merupakan salah satu faktor penting dalam upaya untuk membebaskan UMKM dari situasi sulit ini. Sebab Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap persoalan dalam masyarakat. Saat ini UMKM mengalami aneka macam pertarungan, seperti halnya yang dialami oleh Pelaku bisnis UMKM Batik di Kalurahan Pandowoharjo bahwa di masa pandemi sekarang banyak kesulitan yang dialami antara lain penjualan yang semakin menurun, kurangnya pemasukan modal, distribusi terhambat, dan berkurangnya pembeli di masa pandemi. UMKM menjadi penggerak ekonomi domestik dan penyerap energi kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang menjadikan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali dibutuhkan solusi mitigasi dan pemulihan. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mensiasati penurunan dalam UMKM yaitu dengan menerapkan upaya yang mungkin membantu memulihkan UMKM itu sendiri. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandowoharjo walaupun hanya membantu mengumpulkan data atau yang berupa administrasi masyarakat yang terdampak covid-19 untuk mempertahankan dan meningkatkan UMKM ditengah Pandemi Covid-

19 seperti mengadakan pelatihan manajemen pemasaran produk melalui teknologi digital dimasa pandemi covid-19, dan pelatihan manajemen dan marketing usaha yang berlangsung secara online selama dua hari. Kegiatan tersebut berupa study banding atau kunjungan-kunjungan wisatawan di Kalurahan Pandowoharjo. Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo memfasilitasi tempat atau gedung untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, BUMDesa yang ada di Kalurahan Pandowoharjo bekerjasama dengan UMKM Batik sehingga para wisatawan diajak untuk mengunjungi UMKM Batik untuk melihat hasil karya para pengrajin batik. Selain melihat hasil karya tersebut para wisatawan juga membeli produk yang dihasilkan dari para pengrajin batik.

Salah satu makna Pemerintah Desa adalah proteksi. Proteksi artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan berusaha, kesempatan mengakses sumber daya alam, dan sebagainya. Tujuannya adalah melindungi rakyat jelata dari sekelompok kecil elit (baik ekonomi maupun politik) (Sutoro Eko, 24 Oktober 2020 dalam <https://youtu.be/NG7IQkaJt4Q>).

Persoalan UMKM ini, setidaknya ditunjukkan oleh beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: *Pertama*, jurnal penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Nardi Sunardi dkk (2020) yang berjudul “*Peran Manajemen Keuangan dan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan bagi UMKM Pasar Modern Intermoda BSD*”

City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat ini bekerjasama dengan PT. Sarana Jakarta Ventura dan Pengelola Pasar Modern BSD City Tangerang. Dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi UMKM yang ada di pasar modern Intermoda BSD City, Tangerang Selatan agar dapat bangkit dan mandiri dalam masa pandemi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah ceramah, diskusi, dan pemberian materi mengenai manajemen keuangan dan digital marketing serta strategi yang harus dijalankan oleh UMKM agar dapat survive pada masa pandemi ini, Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat di Pasar Modern BSD City ini adalah UMKM membutuhkan bantuan dalam hal permodalan dan pendampingan agar dapat bangkit dan mandiri dimasa pandemi ini. Solusi yang diberikan adalah bantuan permodalan bagi UMKM oleh PT Sarana Jakarta Ventura dengan biaya administrasi yang ringan.

Kedua, jurnal penelitian oleh Hanantyo Sri Nugroho (2018) yang berjudul "*Democratic Governance* (Studi mengenai Governability dalam Pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis e-commerce linear terhadap kualitas democratic governance, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuhpekewuh. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsesus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap

partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki perkembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program.

Ketiga, jurnal penelitian oleh Siti Yuliasuti Amijaya dkk (2020) Universitas Kristen Duta Wacana, Program Studi Arsitektur, yang berjudul “*Pengembangan Strategi Pemasaran dan Promosi Produk UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit bagi setiap warga masyarakat. Pandemi Covid ini telah menggerogoti sendi-sendi perekonomian, tidak luput juga bagi para pelaku usaha dan UMKM. Di tengah masa yang sulit ini, UMKM sebagai pilar perekonomian masyarakat menghadapi kendala dan kesulitan untuk bertahan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai respon atas kesulitan yang dialami oleh kelompok batik Paguyuban Batik Tulis Langensari (PBTLS) sebagai mitra dampingan Universitas Kristen Duta Wacana. Melalui serangkaian kegiatan penjangkaran informasi dari para anggota, tim pengabdian menemukan kendala pokok bagi kelompok untuk bisa tetap berproduksi di tengah situasi ini. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disesuaikan dengan situasi pandemi, sehingga beberapa rencana kegiatan awal harus diubah. Kegiatan workshop dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan. Mempertimbangkan hal ini, arah tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian menyesuaikan kebutuhan dari kelompok melalui metode

yang memungkinkan untuk dikembangkan. Penyebaran kuisioner daring memperoleh hasil bahwa kebutuhan yang mendesak di masa pandemi dan memasuki era kenormalan baru saat ini adalah metode pemasaran atau promosi yang lebih efektif. Arah pelaksanaan pengabdian disesuaikan dengan kebutuhan kelompok untuk melakukan promosi produk melalui media digital dan e-commerce.

Kegiatan pelaksanaan terbagi menjadi 3 tahap, yakni sosialisasi program, jajak pendapat tentang kebutuhan promosi produk di masa pandemi, dan inisiasi perancangan dan pembuatan konten promosi dengan media digital. Luaran yang akan dihasilkan melalui program pendampingan adalah modul pembuatan konten promosi dan desain media digital. Pendampingan pembuatan modul konten digital merupakan bentuk pemberdayaan dan edukasi komunitas. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan peningkatan omzet penjualan produk batik tulis dari PBTLS.

Keempat, jurnal penelitian oleh Bambang Arianto (2020) yang berjudul “*Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 telah membuat mayoritas sektor ekonomi terutama UMKM menjadi stagnan. Ekksesnya mayoritas pelaku UMKM tidak bisa berkembang dan banyak yang berakhir pada kebangkrutan. Hal inilah yang membuat, pelaku usaha UMKM mengubah strategi penjualan melalui skema digitalisasi. Skema digitalisasi yakni dengan memanfaatkan market place (perantara) dan menggunakan

media sosial sebagai teknik pemasaran. Selain itu pelaku UMKM digital harus dapat bersinergi dengan warganet dalam pemasaran produk dan jasa. Dengan demikian skema pengembangan UMKM digital dapat menjadi salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha ditengah pandemi covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengelaborasi berbagai literatur akan pengembangan UMKM digital. Dengan adanya strategi pengembangan UMKM melalui teknik digital ini telah menjadi alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Kelima, jurnal penelitian oleh Winda Suci Lestari Nasution dkk (2021) Universitas Esa Unggul, Program Studi Politeknik Perdana Mandiri Purwarkarta yang berjudul “*Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Pandemi Covid-19 yang terjadi melanda seluruh dunia, secara global, termasuk Indonesia, tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama disektor ekonomi. Himbauan untuk mencegah mata rantai penyebaran virus

ini mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan mengurangi kegiatan diluar rumah. Semua sendi kehidupan terpengaruhi dan dipaksa untuk mengubah pola hidup, pola kerja, pola berpikir dan pola-pola lain yang dijalankan manusia. Dampak negatif akibat pandemi covid-19 ini telah menghambat pertumbuhan UMKM. Indonesia yang didominasi oleh UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak oleh adanya pandemi covid-19, bukan hanya pada aspek produksi dan pendapatan saja namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi dan lain-lain. UMKM kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi pandemi covid-19 ini dikarenakan beberapa hal seperti tingkat digitalisasi yang masih rendah, kesulitan dalam mengakses teknologi dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis.

Keenam, jurnal penelitian oleh Clarisa Alfa Lionora dkk (2021) Universitas Tidar, yang berjudul “*Fenomena Kinerja Struktur Pasar UMKM Sektor Perdagangan di Kota Magelang Selama Masa Pandemi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama merosotnya perekonomian Tiongkok yang kemudian memberikan dampak bagi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan dan diprediksi akan menurun hingga minus 0,4% dalam skenario terburuknya. Berdasarkan data BPS, selama pandemi ada sebanyak 82,85% UMKM Indonesia yang mengalami penurunan omset. Demi keberlangsungan usahanya, pelaku UMKM perlu mengetahui struktur pasar dan tingkat konsentrasi pasar yang akan dituju agar dapat merencanakan strategi yang

tepat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan studi pustaka. Pengambilan sampel dalam studi ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan statistika deskriptif, Concentration Ratio, dan Herfindahl-Hirschman Index untuk menganalisis data terkait kinerja dan struktur pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai variabilitas fenomena kinerja dan struktur pasar pada UMKM Sektor Perdagangan Kota Magelang selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis data, Kecamatan Magelang Utara menjadi kecamatan dengan rata-rata kinerja yang paling rendah sementara Kecamatan Magelang Selatan mempunyai rata-rata kinerja tertinggi di antara ketiga kecamatan yang ada di Kota Magelang. Kecamatan Magelang Selatan, Magelang Tengah, dan Magelang Utara sama-sama mempunyai struktur pasar persaingan sempurna dengan tingkat konsentrasi yang rendah sehingga mudah bagi para pelaku UMKM untuk keluar masuk pasar. Dengan mengetahui struktur pasar dan tingkat konsentrasi pasar, maka pelaku UMKM dapat merancang strategi yang tepat untuk bertahan dan berkembang.

Ketujuh, jurnal penelitian oleh Hironimus Leong dkk (2020) universitas tanjungpura pontianak, program studi magister manajemen, yang berjudul “*Inovasi Pemasaran Digital Bagi UMKM di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*” pandemi yang berlangsung selama tahun 2020 mengakibatkan keterpurukan ekonomi bagi UMKM khususnya bahan baku alam. Pasar suplai bahan baku dan juga pasar penjualan yang hilang sebagai efek dari penurunan daya produksi dan juga daya beli masyarakat. Salah satu

solusi inovasi yang tersedia di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) adalah transformasi digital dalam bidang pemasaran. Ketersediaan media sosial dan juga berbagai e-commerce untuk penjualan online menjadi harapan bagi UMKM untuk tetap bertahan. Pemasaran yang dilakukan secara tradisional harus beradaptasi dengan memiliki akses yang dekat dengan perkembangan teknologi. Transformasi pemasaran konvensional ke pemasaran digital secara masif menjadi tantangan bagi UMKM bahan baku alam untuk memperluas jangkauan pemasaran dan mendorong roda perekonomian.

Kedelapan, jurnal penelitian oleh Betari Maharani dkk (2020) Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berjudul “*Pelatihan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Keterampilan Pelaku UMKM di Desa Srumbung Magelang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 26 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Srumbung yang terdaftar di kantor desa. Namun tidak semua UMKM berjalan dengan baik. Sebagian besar pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam menggunakan teknologi informasi. Sedangkan keberadaan teknologi informasi bagi pelaku UMKM sangat penting, terutama sejak munculnya Covid-19 dan penerapan Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keberadaan UMKM akan terhambat atau terpuruk jika tidak memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan dan keterampilan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan Facebook dan Instagram sebagai sarana pemasaran online.

Pesertanya adalah 4 UMKM terdiri dari UMKM Jenang dan Krasikan, Keripik Pegagan, Sagon Kering dan Manisan Salak. Metode yang digunakan adalah edukasi (sosialisasi) tentang pemasaran online dan pelatihan pengoperasian dan manajemen media sosial Facebook dan Instagram. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengoperasikan dan mengelola Facebook dan Instagram sebagai sarana media pemasaran digital. Selain itu, masing-masing UMKM juga telah memiliki akun bisnis di media sosial. Jaringan dengan pemasok bahan baku dan pelanggan juga mulai terbangun melalui akun media sosial yang dibuat.

Kesembilan, jurnal penelitian oleh Dian Muhamad Rifal dkk (2021) Universitas Sahid Surakarta, yang berjudul “*Pelatihan Strategi UMKM Dalam Bertahan dan Berkembang di Era Pandemi Covid 19 di Pengrajin Pothil Desa Clapar Purwodadi Tegalrejo Magelang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa Pandemi adalah masa yang cukup sulit yang dihadapi oleh semua kalangan tidak terkecuali pada UMKM kecil menengah. Hal ini juga berdampak pada pengrajin Pothil di desa Clapar Tegalrejo Magelang. Dalam persaingan UMKM diperlukan beberapa komponen yang harus dipenuhi agar UMKM dapat bersaing di dunia wirausaha Indonesia, baik lokal maupun nasional. Beberapa permasalahan yang biasanya dialami adalah modal usaha yang terbatas, distribusi tidak tepat, pengelolaan keuangan tidak efisien, kurangnya inovasi, belum memaksimalkan pemasaran online, pembukuan masih manual, manajemen waktu, dan tidak memiliki Izin. Program yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pengrajin Pothil di desa Clapar

Tegalrejo Magelang ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pengrajin Pothil didaerah tersebut agar lebih terbuka dalam mengembangkan inovasinya unuk pengembangan usaha. Program kemitraan masyarakat ini akan berdampak positif bagi mereka yang akan menyambut persaingan UMKM di Indonesia. Pelatihan ini akan memberikan teori secara terukur dalam menghadapi era pndemi Covid 19 dan bersaing didunia usaha.

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya, pada penelitian terdahulu adalah pada salah satu variabel yang membahas pokok permasalahan yaitu upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM serta dalam skripsi ini sama-sama menggunakan pendekatan eksplanasi dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian ini tentang Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM Batik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh terkait Governing Pemerintah Desa bagi UMKM. Oleh karena itu, penulis mengajukan skripsi penelitian yang berjudul **“Governing UMKM Batik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM pengrajin Batik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman?''.
2. Bagaimana kendala pengembangan dalam pemerintah kalurahan Pandowoharho dan para pelaku bisnis UMKM batik dalam di tengah pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM pengrajin Batik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala para pelaku bisnis UMKM batik di tengah pandemi Covid-19 di Kalurahan Pandowoharjo, Kanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya pengetahuan para pelaku bisnis UMKM tentang upaya pemerintah desa untuk mempertahankan dan meningkatkan UMKM Batik di Tengah Pandemi Covid-19; dan
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah referensi bagi para pelaku bisnis UMKM terkait upaya dari pemerintah desa dalam penyelesaian masalah dibidang ekonomi selama pandemi Covid-19.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan di latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM Batik di tengah pandemi covid-19 di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
2. Program dan realisasi pelaksanaan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan dan mempertahankan para pelaku bisnis UMKM Batik ditengah pandemi covid-19 yang diawali melalui perencanaan pengembangan UMKM Pengrajin Batik yang duwujudkan dalam pembinaan. Seperti manajemen, implementasi manajemen, modal/supporting modal, sarana produksi dan pemasaran (output produksi);
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi para pelaku bisnis UMKM Batik di tengah pandemi Covid-19.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Governing

Stephen Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Rulling But Not Governing* menunjukkan perbedaan antara memerintah (*governing*) dan menguasai (*rulling*). Tulisan ini berangkat dari sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir di mana kekuatan militer mendominasi segala lini kehidupan masyarakat Mesir. Tetapi, kekuatan militer ini bukan meruakan tindakan memerintah karena mereka tidak menjalankan tugas mengatur dan mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (*rulling*).

Rulling dan *governing* mempunyai perbedaan. *Rulling* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh tentara atau non pemerintah. *Rulling* punya makna menguasai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi. Sedangkan *governing* melekat pada pemerintah atau otoritas yang terlegitimasi untuk memerintah atau menyelenggarakan pemerintah. Pengertian dasar memerintah yaitu *Excercizing Political Authority*, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Memerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan.

Governing itu membahas mengenai mengatur dan mengurus yang diambil dari tradisi Belanda, mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*law making*), mengurus (*bestuur*) mengurus (memanaging), dan mengelola. Jadi, makna mengatur dan mengurus itu adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Konsep ini menjalankan beberapa fungsi

yaitu mengarahkan (*steering*), menata (*ordering*), memerintah (*governing*), dan menguasai (*rulling*).

Robert Dahl tahun 1961 berbicara pada tataran siapa yang memerintah (*who govern*) yang memiliki otoritas secara formal atau institusi yang untuk menguasai. Sedangkan William menggunakan konsep siapa yang menguasai (*who rule*). Yang menjadi fokus utama adalah *governing* sebagai basis konsep identitas.

Governing mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Fungsi pemerintahan adalah *protecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*. *Protecting* artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* artinya mengatur dan mengurus ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh Pemerintah.

Elinor Ostrom dalam bukunya yang berjudul *Governing Common Pool Resource* (Sumber Daya Milik Bersama) mengatakan bahwa semua orang bisa memanfaatkan tapi tidak bisa memiliki. Terdapat permasalahan jika dikelola hanya oleh negara atau hanya oleh komunitas sehingga alternatif yang ditawarkan oleh Ostrom adalah Institusi kolaborasi yang berbasis pada komunitas lokal seperti pengalaman pengelolaan air dan danau di Amerika Utara yang dapat mengurangi permasalahan baik itu kemiskinan, degradasi lingkungan, eksklusivitas atau sengketa. Dalam Konteks

Indonesia Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dapat menimbulkan tragedi kecuali komunitas yang terbentuk secara permanen seperti masyarakat adat karena kelompok-kelompok masyarakat hasil bentukan seperti oleh DISPAR atau kementerian yang lain dapat menimbulkan tragedi.

Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus dan mengurus mempunyai beberapa makna:

- a. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), dan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola BUMDes Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.
- b. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab melembagakan

Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.

- c. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola posyandu. Contoh lain: desa memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi tidak mampu (miskin).
- d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Jika desa berwenang mengurus, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa. Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Hutan desa dapat diambil sebagai contoh. Hutan desa merupakan hak milik negara Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa tersebut dengan cara

harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan mengatur hutan desa sebagai hak kelola desa.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah; yaitu: pengaturan (public regulation), pelayanan publik (public goods) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, apa yang disebut urusan pemerintahan tersebut sudah diatur dan diurus oleh pemerintah, bahkan sudah dibagi habis kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 dan undang-undang sektoral lainnya. Apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan. Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan

publik kepada warga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan bersama masyarakat yang terkait dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat, berskala dan bersifat lokal (setempat), dan terkadang belum tercakup dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Rumusan governing yang mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Konsep governing dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pandowoharjo dalam mengembangkan UMKM Batik di tengah pandemi Covid-19. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlu adanya pertanggungjawaban dari pemerintah Kalurahan Pandowoharjo untuk membantu menstimuluskan pendapatan UMKM Pengrajin Batik agar tetap stabil. Untuk menciptakan UMKM Pengrajin Batik agar tetap bergerak dalam situasi pandemi ini pemerintah Kalurahan Pandowoharjo melahirkan beberapa program yang diarahkan pada pengembangan dan sasarannya adalah para pelaku bisnis UMKM Pengrajin Batik. Berbagai program yang dikembangkan oleh pemerintah Kalurahan Pandowoharjo untuk membantu mempertahankan UMKM Pengrajin Batik ditengah pandemi covid-19 seperti pembinaan marketing online dan pelatihan manajemen usaha yang berlangsung selama 2 hari.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan disepadankan dengan *policy*, dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*: kebijaksanaan). Makna kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu (Ellau dan Prewit).

Situasi Covid-19 menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis UMKM. Dengan memanfaatkan sejumlah keringanan dan program-program yang diberikan oleh pemerintah, pelaku usaha diharapkan mampu bertahan di tengah pandemi.

Pemerintah Desa membuat kebijakan melalui perencanaan pengembangan UMKM Pengrajin Batik yang duwujudkan dalam pembinaan. Ada beberapa pembinaan yang dibutuhkan dalam pengembangan UMKM Pengrajin Batik yaitu:

a. Manajemen

Menurut Suyadi (2001) dalam Febtia (2020) mengatakan manajemen produksi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan untuk membuat barang yang berasal dari bahan baku dan bahan penolong lain. Menurut Assauri (2004) produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa.

b. Implementasi Manajemen.

Kebijakan yang tertuang dalam konsep manajemen yang berbasis pemasaran ini harus dimaknai sebagai bentuk realisasi yang berorientasi pada pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk agar tetap eksistensi. Kebijakan perencanaan pengembangan melalui *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

c. Modal/supporting Modal.

Pada sisi lain pelaku UMKM masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Modal merupakan salah satu instrumen penting pendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Di samping modal finansial terdapat modal sosial yang bersumber dari masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan Pandowoharjo juga menyediakan bantuan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah tanggung jawab pemerintah dalam menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Sarana Produksi

Sarana produksi seperti bahan baku, alat membatik, waktu, tempat dan tenaga manusia sebagai sumber daya yang diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan dasar berupa kain batik.

e. Pemasaran (*output produksi*)

Strategi pemasaran adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Strategi pemasaran dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun perencanaan usaha secara menyeluruh. Semakin kerasnya persaingan yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya, dengan situasi tersebut UMKM harus memiliki strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan antar UMKM. Pemasaran perlu mendapat perhatian serius oleh UMKM terutama dalam proses penetapan strategi pemasaran yang dipilih akan mampu menembus pasar. Apalagi kondisi persaingan yang semakin ketat seperti saat ini, kemampuan untuk merebut pangsa pasar akan dihadapi UMKM itu sendiri. Dalam menghadapi persaingan industri ditengah pandemi covid-19 pemerintah Kalurahan Pandowoharjo melaksanakan program yang berupa upaya pengembangan UMKM Batik melalui pelatihan pembinaan marketing online. Melalui program pemasaran ini merupakan hal penting yang berkaitan kelangsungan hidup suatu usaha. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara berkomunikasi masyarakat namun juga metode perdagangan. Dengan adanya pemasaran secara online merupakan peluang besar bagi para pelaku bisnis UMKM karena bisa menjangkau lebih banyak pelanggan yang lebih luas. Digital marketing menjadi salah satu media yang

sering digunakan oleh pelaku usaha karena kemampuan baru konsumen dalam mengikuti arus digitalisasi. Pemerintah desa terus berupaya untuk membantu mempromosikan produk-produk yang dibutuhkan pada masa-masa pandemi melalui promosi daring.

Tahap-tahap perumusan kebijakan:

a. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah (issue-issue) publik. Ini merupakan proses yang fundamental, dimana kesalahan dalam perumusan masalah akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah.

b. Agenda Kebijakan

Setelah dilakukan perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah yang ada di masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyusun agenda kebijakan. Dalam proses ini akan dilakukan analisis apakah masalah yang ada merupakan masalah publik dan pantas dimasukan ke dalam agenda kebijakan atau tidak. Tidak semua masalah yang ada masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah apa saja yang termasuk dalam agenda kebijakan, tentunya adalah masalah-masalah yang memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dikatakan masalah publik, yang perlu dibuat kebijakan. Salah satunya adalah apakah masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak (rakyat) dan memiliki dampak yang luas atau tidak.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Alternatif merupakan pilihan-pilihan pendamping pilihan utama. Alternatif yang tersedia merupakan pilihan-pilihan yang dapat dinilai dan dianalisis untuk dicari kebaikan dan keburukannya. Dalam proses perumusan kebijakan publik, maka proses pemilihan alternatif merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pada tahap ini akan terjadi pertarungan kepentingan antar kelompok yang relatif berbeda dasar pemikiran dan tujuannya.

d. Penetapan Kebijakan

Pada tahap pemilihan alternatif, kebijakan untuk pemecahan masalah berakhir, maka outputnya adalah diambilnya salah satu alternatif sebagai upaya terbaik untuk memecahkan masalah. Langkah selanjutnya (sebagai proses terakhir) adalah menetapkan kebijakan. Pada tahap ini melakukan pengesahan kebijakan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Penetapan yang dilakukan dapat beberapa: Undang-Undang, Yurisprudensi, keputusan-keputusan organisasi, dan lain-lain.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu dari banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari wabah covid-19. Salah satunya UMKM Batik yang ada di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Yang mengalami penurunan pada masa pandemi saat ini tentunya disebabkan beberapa faktor internal

maupun eksternal. Pasang surut usaha pasti akan tetap ada tinggal bagaimana kita untuk bangkit dalam keterpurukan yang sedang menimpa, beberapa usaha pasar menghilang seiring daya beli masyarakat yang terus menyusut akibat pembatasan aktivitas sosial sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19. Aktivitas masyarakat diluar ruangan cenderung berkurang dan membuat pendapatan para pelaku bisnis UMKM menjadi ikut merosot. Mereka mulai merasa kesulitan dalam menyeimbangkan arus kas serta memenuhi kebutuhan operasional produksi karena omzet yang di dapat belum sesuai dengan harapan.

Upaya untuk mencari alternatif sistem ekonomi pun mulai dilakukan. Pelaku usaha yang memiliki komitmen untuk keluar dari cengkaman keterpurukan ini digagas oleh banyak kalangan baik oleh aktivis, akademis, intelektual, ataupun pihak pemerintah. Program-program yang bernuansa pengembangan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memertahankan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan sistem perekonomian. Melihat situasi seperti ini, pemerintah Kalurahan Pandowoharjo mengadakan kegiatan pameran-pameran atau event-event untuk memasarkan produk hasil karya dari para pelaku bisnis UMKM Pengrajin Batik.

Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo berusaha untuk mengatasi dan melaksanakan beberapa kegiatan yang mengacu pada pengembangan melalui pembinaan. program yang diwujudkan dalam pengembangan UMKM Batik untuk mendukung stabilitas UMKM Batik pada masa

pandemi seperti pembinaan marketing online dan pelatihan manajemen usaha yang berlangsung selama 2 hari. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari luar desa namun dilaksanakan di Kalurahan Pandowoharjo. Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo hanya memfasilitasi tempat atau gedung pelaksanaan pelatihan tersebut.

3. Konsep UMKM

Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008. tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria. Sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tantangan terbesar bagi pemerintah desa dan para pelaku bisnis UMKM Batik di tengah dampak pandemi Covid-19 ini adalah bagaimana menjaga keeksisan sebuah karya agar tidak semakin menipis dan tergerus oleh ketatnya persaingan produksi batik dan dampak merosotnya penjualan imbas dari pandemi covid-19. Kembali pada peluang dan tantangan bagi para pelaku bisnis UMKM Batik yang saat ini terkena dampak wabah covid-19, pemerintah Kalurahan Pandowoharjo memberikan ruang pelatihan UMKM-UMKM yang ada di Kalurahan Pandowoharjo. Kegiatan tersebut berupa pelatihan marketing online.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibuat oleh Disperindag dan pemerintah Kalurahan Pandowoharjo hanya memfasilitasi tempat atau gedung pelatihan. Selain itu, BUMDes yang di Kalurahan Pandowoharjo bekerjasama dengan UMKM Batik sehingga ketika ada kegiatan studi banding, para wisatawan yang berkunjung ke BUMDes juga diajak ke UMKM Batik untuk melihat produk batik yang siap dipasarkan. Kondisi seperti ini sangat dirasakan bagi para pelaku bisnis UMKM Batik di Kalurahan Pandowoharjo yang terdampak pandemi Covid-19. Dampak corona membuat pendapatan para pelaku bisnis UMKM Batik menurun secara signifikan sehingga adanya perbedaan pendapatan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19.

4. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioanl yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, penyelenggaran desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang berkedudukan langsung di desa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal (2) dan (3) menyebutkan bahwa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola potensi lokal desa.

5. Pandemi Covid-19

Namun sekitar Maret 2020, penyakit yang disebut pandemi Covid-19 (coronavirus) merebak di Indonesia. Virus Corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perawatan khusus. Sejak insiden besar terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, virus Corona sudah ditemukan pada manusia. Pandemi global Covid-19 pasti akan menyerang semua sektor, terutama sektor ekonomi. Dampak ekonomi ini terjadi tidak

hanya di dalam negeri, tetapi juga secara global. Di Indonesia, hal ini tentunya juga akan berdampak signifikan terhadap industri pariwisata, sektor perdagangan, dan industri termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 maka pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kemendagri yang ditandatangani Tito pada tanggal 2 Juli 2021 ini dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Peraturan ini juga untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri sebelumnya, mengenai PPKM Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 (<https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa-bali/>).

Di Indonesia, menurut data terbaru tertanggal 11 Oktober 2021, Indonesia memiliki 4,23 jt kasus Covid-19. Covid-19 yang berdampak kesegala sektor, salah satunya sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh Para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pandowoharjo yang mengalami krisis ekonomi. Daya beli masyarakat yang semakin berkurang akibat pandemi covid-19 yang

berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Pendapatan para pelaku bisnis jauh berbeda dengan pendapatan sebelum adanya pandemi. Oleh karena itu, pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor terutama lembaga pemerintah desa. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan stimulus UMKM. Melihat permasalahan yang dialami para pelaku bisnis UMKM Batik pemerintah desa mengadakan pembinaan berupa pelatihan manajemen pemasaran produk melalui teknologi digital dimasa pandemi covid-19, dan pelatihan manajemen dan marketing usaha yang berlangsung secara online selama 2 hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Eksplanasi. Dimana peneliti akan menguji kebenaran hipotesis yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Untuk menguji kebenaran hipotesis, peneliti, peneliti menyebar angket kepada responden, mengolah data, serta menganalisis data yang telah diolah.

2. Unit Analisis

a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan atau narasumber dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau data dalam sebuah

penelitian. Informan atau narasumber dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sejauh mana governing pemerintah desa dalam pengembangan UMKM pengrajin batik.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive. Konsep tentang purposive menurut (Jhon Crewswell, 2015: 217) digunakan dalam penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa sang peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka secara spesifik memberi pemahaman tentang problem riset fenomena dalam studi tersebut.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah penelitian eksploinasi yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2013: 229).

c. Informan

Informan merupakan orang yang mampu memberikan informasi tentang hal yang ingin diketahui penulis. Informan adalah orang yang mengetahui tentang kasus yang sedang di teliti atau orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang hendak di teliti.

Analisis data merupakan cara pengelolaan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Pengelolaan data yang dimaksudkan untuk membuktikan keterangan yang dikemukakan oleh penulis. Sebelum melakukan analisis data berdasarkan hasil penelitian,

terlebih dahulu menelaah mengenai informan yang akan di tinjau dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan agama. Data yang penyusun sajikan sebagai berikut ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan kepada Pemerintah Kalurahan dan juga kepada para pelaku bisnis UMKM pengrajin batik Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara, untuk mengetahui Governing Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik di Tengah Pandemi Covid-19.

Dari hasil wawancara dengan informan tentang governing pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM pengrajin batik di tengah pandemi covid-19, di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Data yang dianalisis tersebut menggunakan metode pendekatan eksplanasi untuk lebih memudahkan menganalisis data tersebut, peneliti menganalisis berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variable sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang jelas.

Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik Ditengah Pandemi Covid-19, di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya akan penulis paparkan dalam bab ini dengan hasil wawancara

yang diperoleh di lapangan dari beberapa informan yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan terkait Governing Pemerintah Desa dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik di Tengah Pandemi Covid-19, di Kalurahan Pandowoharjo, peneliti menyimpulkan bahwa governing pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM pengrajin batik di tengah pandemi covid-19 yang berawal dengan latar belakang Kalurahan Pandowoharjo yang hampir sebagian besar penduduknya berrmatapencarian sebagai buruh tani sehingga memiliki pekerjaan sampingan sebagai Pelaku bisnis UMKM Batik. UMKM batik ini sudah menjadi pekerjaan sampingan dari Ibu PKK, akan tetapi jika pada musim panen tiba, Ibu-ibu yang bekerja sebagai pelaku bisnis UMKM turun ke sawah untuk berpanen.

Tabel 1 Data Informan

No	Nama	Pekerjaan/ Jabatan	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Pendidikan
1	Bapak Catur Sarjumihata	Kepala Desa/ Lurah	L	54	S1
2	Bapak Bharuto Anung Santosa	Sekretaris Desa	L	46	SLTA
3	Bapak Marjono	Ulu-Ulu/ Penanggung jawab UMKM	L	51	SLTA
4	Bapak Marcellius R. Cahya	Anggota BPD	L	31	SE
5	Ibu Siti Muzorawah	Batik Ayu Arimbi	P	46	SLTA
6	Ibu Sunartini	Batik Ayu Arimbi	P	65	SLTA
7	Ibu Triwening Hidayati	Batik Ayu Arimbi	P	54	SLTA

Sumber: Data Primer (data observasi)

Dari tabel 3.1 dapat diketahui bahwa informan dari Pemerintah Kalurahan berjumlah 4 (empat) orang, anggota BPD 1 (satu) orang dan para pelaku bisnis (UMKM pengrajin batik) berjumlah 3 (tiga) orang. Penentuan informan ini dianggap dapat memberikan informasi sesuai masalah penelitian yang dikaji yaitu tentang governing pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM pengrajin Batik di tengah pandemi covid-19.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Menurut Burhan Bungin (2007: 110), metode pengumpulan data kaulitatif yang paling independen adalah metode observasi, waawancara, dan dokumentasi, yang kemudian didefinisikan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.

Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri data historis desa seperti sejarah berdirinya Desa Pandowoharjo Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Peraturan Desa dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

d. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *persistent observation* (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *trianggulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan

pengecekan atau pembanding terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono dalam Rustanto, (2015) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi), dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada tahap analisis kualitatif ini, penelitian menggunakan beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek

yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri, oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay*-kan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, teks, transkrip dan lainnya yang paling banyak dipergunakan. Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO, KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN-DIY

A. Sejarah Kalurahan

Pada mulanya Pandowoharjo terdiri dari 5 (lima) kalurahan yaitu Kalurahan Tlacap, Kalurahan Brayut, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Majegan dan Kalurahan Jabung yang kemudian bergabung menjadi 1 (satu) yaitu Kalurahan Pandowoharjo. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2018 diselenggarakan Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Kepala Kalurahan, Perangkat Kalurahan, BPD, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, RT, RW yang berjumlah 60 orang, hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penentuan Hari Jadi Kalurahan Pandowoharjo.

Setelah selama 4 bulan tidak ada protes atau usulan maka pada tanggal 19 Juli 2018 di keluarkan produk hukum Peraturan Kalurahan Pandowoharjo no 4 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Pandowoharjo yaitu tanggal, 11 November 1946 dengan *condrosengkolo* berbunyi “*Mangsa Karya Gapura Tunggal*” atau dalam bahasa Indonesia berarti Saat Berkarya Menuju Gerbang Persatuan, yang dapat dimaknai saatnya membuat kesepakatan bersatunya lima kelurahan menjadi satu yaitu Kelurahan Pandowoharjo (Kalurahan Pandowoharjo).

Dalam dokumen RPJM Kalurahan Pandowoharjo dijelaskan bahwa banyak tokoh-tokoh pendahulu terlibat dalam pembentukan kalurahan

Pandowoharjo, hakikatnya merekalah pahlawan-pahlawan Pandowoharjo yang telah menorehkan sejarah perjalanan panjang Kalurahan Pandowoharjo. Hal ini menimbulkan sebuah kebanggaan dan membangkitkan semangat ber-Kalurahan bagi seluruh warga Kalurahan Pandowoharjo.

B. Visi Misi Kalurahan Pandowoharjo

Dalam menjalankan tugas, Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo memiliki Visi dan Misi yang sudah disepakati Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat. Adapun Visi dan Misi Kalurahan Pandowoharjo adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Penyusunan Visi Kalurahan Pandowoharjo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Pandowoharjo seperti pemerintah Kalurahan, BPKal, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kalurahan dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Pandowoharjo adalah: “Menjaga dan memantapkan predikat Pandowoharjo sebagai Kalurahan Mandiri Budaya dengan perencanaan yang jelas (sukses *by design*), *Run by system* dan *rule of the law* dalam rangka percepatan Pandowoharjo menuju Kalurahan mandiri yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan berwawasan lingkungan serta menjunjung tinggi kearifan lokal”.

2. Misi

Misi Kalurahan Pandowoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
- b. Optimalisasi pengembangan kawasan pemberdayaan masyarakat Taman Pandawa;
- c. Meningkatkan Pandowoharjo sebagai salah satu tujuan wisata; dan
- d. Meningkatkan channeling dengan konsep A (dengan Akademisi), B (dengan *Bisnisan*), C (dengan *Community*), G (dengan *Government*).

C. Kondisi Geografis Kalurahan Pandowoharjo

1. Batas Administrasi

Secara administrasi Kalurahan Pandowoharjo terletak di wilayah Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- a. Sebelah utara : Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi
- b. Sebelah Timur : Kalurahan Donoharjo Kapanewon Nggalik
- c. Sebelah Selatan : Kalurahan Sendangdadi Kapanewon Melati
- d. Sebelah Barat : Kalurahan Srimulyo Kapanewon Sleman.

2. Luas Wilayah Dan Pembagian Wilayah

Berdasarkan dokumen profil Kalurahan, Kalurahan Pandowoharjo memiliki luas 727,00 ha yang terdiri dari 22 padukuhan, 47 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga (RT), dengan pembagian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2
Pembagian Wilayah Kalurahan Pandowoharjo

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Plalangan	3	6
2	Jabung	2	4
3	Gawar		4
4	Krandom	2	4
5	Jembulan	2	4
6	Nyaen	2	4
7	Majegan	2	5
8	Jetis Jogopaten	2	5
9	Brayut	2	4
10	Karang Asem	2	4
11	Mancasan-Kleben	2	4
12	Temon	2	4
13	Niron	2	4
14	Sawahan	2	4
15	Toino Jetakan	2	4
16	Gabungan Kloncongan	2	5
17	Karang Tanjung	2	5
18	Jlamprang	2	4
19	Pajangan	2	4
20	Berkisan Mlaten	3	6
21	Sarangan	3	7
22	Tlacap-Grogojan	2	4
Jumlah		47	102

(Sumber: Dok Profil Kalurahan Pandowoharjo 2021-2026)

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah RT dan RW dalam setiap padukuhan di Kalurahan Pandowoharjo cukup berimbang atau dalam arti lain selisih jumlah antara padukuhan tidak terlalu jauh.

D. Kondisi Demografi Kalurahan Pandowoharjo

Berdasarkan data mengenai kependudukan di Kalurahan Pandowoharjo, berikut adalah data-data kependudukan yang meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan matapecaharian, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk berdasarkan agama.

Berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2021-2026, Kalurahan Pandowoharjo dihuni oleh 12.709 jiwa penduduk. dengan rincian 3.463 jiwa laki-laki dan 952 jiwa perempuan.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata pencapaian	Jumlah penduduk	Persentase
1	Petani	157	5%
2	Pegawai Negeri	340	11%
3	Peternak	35	1%
4	Pengrajin	15	0%
5	Buruh Tani	1.229	38%
6	Pensiunan	346	11%
7	UMKM	42	1%
8	Wiraswasta	570	18%
9	Lain-lain	489	15%
	Jumlah	3223	100%

(Sumber: Data RPJMKel 2021-2026)

Dapat dilihat dari tabel 2.4 di atas, mata pencapaian penduduk di Kalurahan Pandowoharjo sebagian besar adalah buruh tani dengan jumlah 1.229 orang atau 38%. Sedangkan petani berjumlah 157 orang atau 5%.

Kemudian peternakan hanya 35 orang atau 1%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Data diatas menunjukkan di Kalurahan Pandowoharjo masyarakat lebih banyak menjadi petani penggarap (pekerja buruh tani) ketimbang memiliki lahannya sendiri.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM hanya berjumlah 42 orang atau 1% dibandingkan dengan jumlah minat masyarakat yang lebih mendominasi pada sektor pertanian. Jika dilihat dari visi misi UMKM yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku usaha, akan tetapi masyarakat Kalurahan Pandowoharjo cenderung tidak memiliki jiwa enterpreuner untuk meningkatkan daya saing dalam dunia usaha.

Pertanian memang merupakan sektor usaha yang sangat bergensi, karena sangat berperan dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia. Namun, hal ini dapat menguras minat masyarakat dalam dunia kewirausahaan. Masyarakat Pandowoharjo lebih memilih sektor tani dibandingkan sektor jasa. Masalah tenaga kerja yang terjadi di Kalurahan Pandowoharjo sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dengan kualifikasi tertentu. Penyediaan lapangan pekerjaan yang telah disediakan dalam bidang usaha akan tetapi pencari pekerjaan jauh lebih memilih bertani dibandingkan menjadi wiraswasta. Ketimpangan yang terjadi diakibatkan karena jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Walaupun demikian, jika

angkatan kerja dapat dikualifikasi dengan baik maka akan mampu meningkatkan daya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mutu tenaga kerja yang relatif rendah dalam tingkat pendidikan dapat mempengaruhi mutu tenaga kerja pada sektor jasa di Kalurahan Pandowoharjo. Hal ini juga dikarenakan karena minimnya penguasaan pengetahuan teknologi pada lapisan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Penyebab lain dikarenakan jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah sedangkan biaya produksi tinggi. Hal ini diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mencari pekerjaan sampingan dengan memilih bertani ketimbang dalam sektor usaha.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk
1	Tidak sekolah / Buta Huruf	2.063
2	Tidak tamat SD	1.306
3	Tamat SD	1.280
4	Tamat SLTP	1.790
5	Tamat SLTA	4.440
6	Tamat D1 – D2	135
7	Tamat D3	417
8	Sarjana (S-1)	1.135
9	Magister S-2	123
10	Doktor (S-3)	19
	Jumlah	12.709

(Sumber: Data RPJMKel 2021-2026)

Dapat dilihat dari tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan di Kalurahan Pandowoharjo sebagian besar masyarakatnya adalah SLTA dengan jumlah 4.440. Disusul dengan masyarakat tidak sekolah dengan jumlah 2063, sementara masyarakat dengan tingkat pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor berjumlah 1277.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Pemeluk agama	Jumlah
1	Islam	11.138
2	Kristen	338
3	Katolik	1.223
4	Hindu	11
5	Budha	6
Jumlah		12.709

(Sumber: Data RPJMKel 2021-2026)

Dari tabel 2.6 di atas dapat menunjukkan di Kalurahan Pandowoharjo bermayoritas agama Islam dengan jumlah 11.138 orang. Kemudian yang kedua disusul dengan Agama Katolik dengan jumlah 1.223 orang.

E. Kondisi Ekonomi Kalurahan Pandowoharjo

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Pandowoharjo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kalurahan Pandowoharjo memiliki beberapa sumber pendapatan kalurahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari hasil kekayaan kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana kalurahan;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; dan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selain itu Kalurahan Pandowoharjo memiliki beberapa aset Kalurahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Kas Kalurahan;
2. Bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan; dan
3. Lain-lain kekayaan milik Kalurahan

Pada umumnya masyarakat Kalurahan Pandowoharjo dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan sumber daya alam yang melimpah dan mendukung untuk kegiatan pertanian, mayoritas masyarakat Pandowoharjo berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Hasil pertanian unggulan di Pandowoharjo adalah jagung, singkong, kacang kacangan dan yang saat ini

mulai dikembangkan oleh beberapa kelompok tani. Kendala yang sering dihadapi petani adalah pengairan, alat pertanian, Sumber Daya Manusia yang saat ini masih menggunakan cara konvensional serta mahal nya harga produk dan pestisida. Selain itu masyarakat umumnya sudah mulai aktif dalam mengelola usaha mikro, kecil dan menengah.

Kondisi perekonomian Kalurahan Pandowoharjo terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah pertanian terutama perkebunan sawah. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah buruh tani.

Tabel berikut menyajikan data mata pencaharian penduduk Kalurahan Pengkok.

Tabel 6
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	157
2.	Pegawai Negeri	340
3.	Peternak	35
4.	Pengrajin	15
5.	Buruh Tani	1.229
6.	Pensiunan	346
7.	UMKM	42
8.	Wiraswasta	570
9.	Lain-lain	489
Jumlah		3223

(Sumber: Dok. Profil Kalurahan 2021-2026)

Dapat dilihat dari tabel 2.7 di atas, mata pencaharian penduduk di Kalurahan Pandowoharjo sebagian besar adalah buruh tani dengan jumlah 1.229 orang Sedangkan petani berjumlah 157 orang. Kemudian peternakan

hanya 35 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat Kalurahan Pandowoharjo.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat didominasi oleh penduduk di sektor pertanian yang berjumlah 1.229 orang. Berbagai ketimpangan penyebab mengapa masyarakat Kalurahan Pandowoharjo lebih memilih bekerja sebagai buruh tani ketimbang sektor Usaha (UMKM) yang masih kurang diminati masyarakat. Padahal sudah diberikan wadah untuk mengembangkan ahli dalam bidang usaha. Menurut apa yang didapatkan peneliti masyarakat yang lebih memilih bertani ketimbang sektor jasa dikarenakan peningkatan upah nominal yang diterima buruh tani lebih besar dari yang diterima pedagang/wiraswasta. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menghambat perekonomian dan pemasukan pada sektor jasa. Sehingga adanya perubahan yang secara signifikan pada pendapatan yang didapatkan sektor jasa setelah adanya pandemi. Adanya pandemi dapat menguras tuntas penghasilan masyarakat yang jauh berbeda sebelum adanya pandemi. Masyarakat melihat penghasilan yang didapat dari sektor jasa selama pandemi tidak menentu dan menunggu hasil yang terlalu lama sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Melihat hal seperti itu masyarakat Kalurahan Pandowoharjo lebih memilih bekerja di sektor pertanian dibandingkan sektor jasa.

F. Sarana dan Prasarana Kalurahan Pandowoharjo

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kalurahan Pandowoharjo memiliki sarana dan prasarana pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintah Kalurahan Pandowoharjo.

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Pemerintahan

No.	Nama	Jumlah (Unit/Buah)
1.	Kantor Kelurahan	1
2.	Ruang Kerja	11
3.	Balai Desa	1
4.	Balai Dusun	22
5.	Mesin Tik	5
6.	Komputer	9
7.	Kendaraan Dinas	16
8.	Kursi	242
9.	Meja	50
10.	Ruang BPD	1

(Sumber: Dok. Profil Kalurahan tahun 2021- 2026)

Berdasarkan tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo cukup memadai hal ini diharapkan dapat mendukung aparat kalurahan dalam bekerja memaksimalkan dan melayani masyarakat khususnya masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

a. Sarana Pendidikan

Untuk mendukung pendidikan masyarakat, Kalurahan Pandowoharjo memiliki prasarana pendidikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 8 Prasarana Pendidikan

No.	Nama	Jumlah (Uni/Buah)
1.	Gedung SD	7
2.	Gedung SMP	1
3.	Gedung SMA	1
4.	Gedung TK	6

(Sumber: Dok. Profil Kalurahan Tahun 2021,2026)

Fasilitas pendidikan di Kalurahan Pandowoharjo cukup memadai mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM Pengrajin batik di Kalurahan Pandowoharjo awal mulanya berawal dari pelatihan-pelatihan membatik yang dilaksanakan di Kalurahan Pandowoharjo lalu selanjutnya diteruskan oleh Ibu PKK sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam setiap kelompok kerja pengrajin batik terdiri dari setiap Ibu PKK sendiri tanpa ada karyawan luar.

3. Institusi/Kelembagaan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, aktivitas dan dinamika masyarakat desa terwadahi dalam tiga institusi/lembaga utama dan kedudukan sebagai mitra kerja. Sehingga

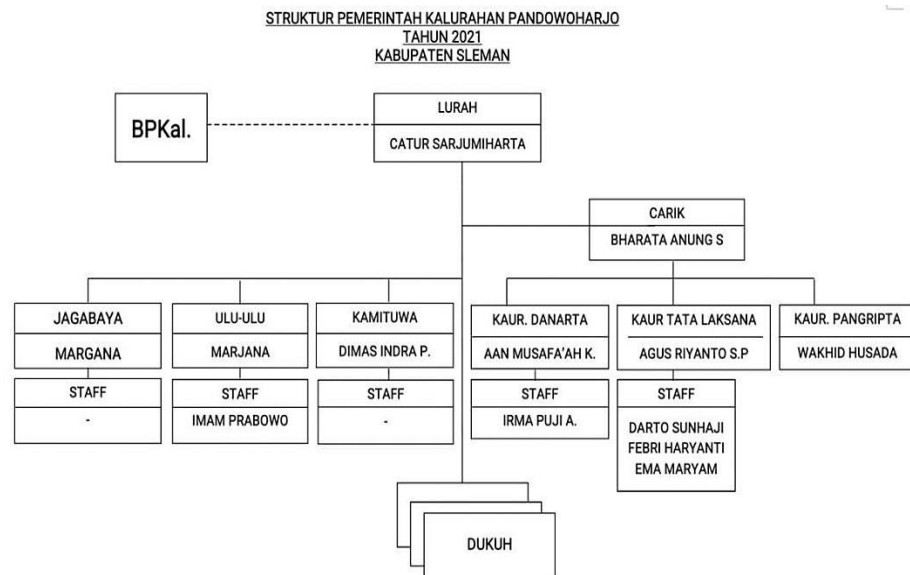
sinergitas atau keterpaduan ketiga lembaga ini sangat dibutuhkan guna pemanfaatan institusi desa yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta untuk mewujudkan kemandirian desa, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perubahan kualitas masyarakat. Ketiga institusi tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif dalam struktur desa yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih oleh rakyat desa secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa.

Sebagai sebuah Kalurahan, sudah tentu struktur organisasi Kalurahan Pandowoharjo tidak bisa lepas dari Struktur Administratif Pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi pemerintahan Kalurahan Pandowoharjo, berikut ini:

Gambar 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo



(Sumber: RPJM Kalurahan TAHUN 2021-2026)

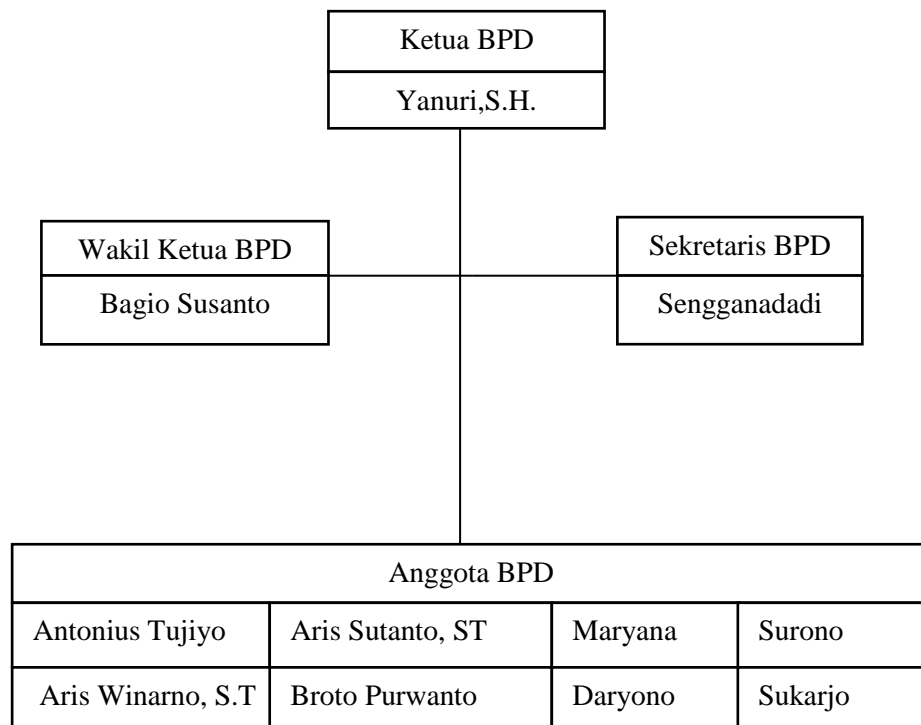
Dari bagan struktur organisasi Kalurahan Pandowoharjo di atas, dapat kita lihat komposisi perangkat yang tidak seimbang. Pada kaur Tata Laksana terdapat tiga (3) orang staf untuk membantu Kaur, disusul oleh Ulu-Ulu dan Kaur Danarta yang masing-masing dibantu oleh satu (1) orang staf, sedangkan Kaur Pangripta, Jagabaya, Kamituwa dan sekretaris tidak dibantu oleh staf.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa, memiliki tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Kalurahan Pandowoharjo berjumlah sebelas (11) orang yang terdiri

dari; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota sebagai terlihat pada bagan berikut:

Gambar 2
Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Pandowoharjo



(Sumber: Dok. Profil Kalurahan 2021-2026)

Dari bagan di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah BPD Kalurahan Pandowoharjo berjumlah 11 orang. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan tentang jumlah BPD paling banyak 9 orang dan paling sedikit 5 orang. Akan tetapi, secara fungsi BPD Kalurahan Pandowoharjo telah sesuai dengan ketentuan.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa. Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2010 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kalurahan Pandowoharjo adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 9
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Pengurus
1.	LPMD	23	24
2.	PKK	23	23
3.	Rukun Warga	47	188
4.	Rukun Tetangga	102	188
5.	Karang Taruna	1	7
6.	Kelompok Tani	1	19

(Sumber: Dok. Profil Kalurahan 2021-2026)

Secara umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kalurahan Pandowoharjo cukup lengkap untuk mewakili elemen masyarakat desa, dalam hal ini, dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung aspirasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Jika dilihat dari dokumen profil Kalurahan Pandowoharjo, perlu adanya pembenahan dalam tata kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kalurahan Pandowoharjo, terutama yang berkaitan dengan kearsipan/data umum, struktur dan fungsi lembaga yang belum optimal.

G. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Pandemi

Covid-19

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tombak di masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan urat nadi penentu perkembangan perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha yang sangat tangguh di tengah krisis ekonomi yang terjadi. Pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM semakin tahan banting dan tetap optimistis ditengah krisis. Ketika terjadi krisis global pelaku UMKM tetap bergerak. Dari data yang telah peneliti dapatkan pendapatan yang didapat oleh para pelaku bisnis UMKM Pengrajin Batik di Kalurahan Pandowoharjo begitu sangat memuaskan walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setidaknya membantu perekonomian keluarga.

H. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Pandemi

Covid-19

Pandemi covid-19 yang saat ini sedang melanda tentunya sangat berpengaruh kepada para pelaku UMKM yang dimana di masa pandemi ini menyerang para pelaku UMKM khususnya di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman yang saat ini menguras pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para pelaku bisnis UMKM Batik. Para pelaku UMKM Batik mengalami kesulitan dalam memutar modal yang didapatkan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar yang sangat tinggi. Pemerintah Desa pun belum mempunyai kebijakan terkait keberadaan UMKM pengrajin batik. Dalam hal ini bahwa, belum maksimalnya governing Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dalam mengembangkan UMKM pengrajin Batik dan belum masuk di RKPDesa, APBDesa ataupun Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan (ed). 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Pusat: Rineka Cipta.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro. 2014. *Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa (FPD).
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Redaksi Sinar Grafika. 2008. *Undang-Undang UMKM (Usaha Miko Dan Menengah) 2008 (UU RI Nomor 20 Tahun 2008)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Arianto, Bambang. 2020. *Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19*. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis Volume 6 Nomor 2.
- Creswell, Jhon. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desai Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Definta, Aliffiana. *Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Marlina, Lili. 2020. *Peluang dan Tantangan ovidovid-10UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*: Universitas Borobudur. Jurnal Ekonomi Volume 22 Nomor 2.
- Nasution, Winda Suci Lestari. 2021. *Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*.

- Purwakarta: Universitas Esa Unggul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta* Volume 1 Nomor 1.
- Niode, Idris Yanto. 2009. *Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah dan Startegi Pemberdayaan*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS NOMOS* Volume 2 Nomor 2.
- Rosyada, Mohammad. 2020. *Strategi Survival UMKM Batik Tulis Pekalongan di Tengah Pandemi Covid-19*. Pekalongan: Banco Volume 2.
- Rustanto, B. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sahputra, Ngatno, Budi Antoro. 2021. *Analisis Strategi Penguatan Usaha Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan*. Jambi: Universitas Dharmawangsa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 2.
- Sri Nugroho, Hanantyo. 2018. *Democratic Governance (Studi Mengenai Governability Dalam Pengembangan UMKM Berbasis E-Commerce di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Amikom. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 6 Nomor 1.
- Sunardi, Nardi, dkk. 2020. *Peran Manajemen Keuangan dan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi UMKM Pasar Modern Intermoda BSD City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* Volume 2 Nomor 1.
- Leong, Hironimus, dkk. 2020. *Inovasi Pemasaran Digital Bagi UMKM di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru: Kajian Deskriptif UMKM Kerajinan Bahan Baku Alam Wilayah Magelang*: Universitas Tanjungpura Pontianak. Seminar Nasional Seri Ke-4 Program Studi Magister Manajemen.
- Lionora, Clarisa, Alfa, dkk. 2021. *Fenomena Kinerja dan Struktur Pasar UMKM Sektor Perdagangan di Kota Magelang Selama Masa Pandemi*: Universitas Tidar. Seminar Nasional.
- Maharani, Betari, dkk. 2021. *Pelatihan pemasaran Digital untuk Meningkatkan Keterampilan Pelaku UMKM di Desa Srumbung Magelang*: Universitas Muhammadiyah Magelang: *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 6 Nomor 4.
- Rifal, Muhamad, Dian, Dkk. 2021. *Pelatihan Strategi Umkm Dalam Bertahan Dan Berkembang Di Era Pandemi Covid 19 Di Pengrajin Pothil Desa*

Clapar Purwodadi Tegalrejo Magelang: Universitas Sahid Surakarta
program pengabdian kepada masyarakat.

Internet

<https://youtu.be/NG7IQkaJt4Q>